

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasil, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan yang terlihat dari berbagai bidang, khususnya pada sektor ekonomi.

Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejala dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Namun Sampai saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan.

Salah satu contoh ketidakmerataan pembangunan Indonesia dengan pembangunan masih berpusat di pulau Jawa, dimana banyak terdapat fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sedangkan pulau kecil tidak mengalami pemerataan pembangunan, sehingga segala kebutuhan hidup penduduk sulit untuk didapatkan, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil.

Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas-fasilitas lainnya mengingat jumlahnya yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk. Ketimpangan pengelolaan merupakan wujud paling nyata dari kelemahan internal kekuasaan yang diharapkan mampu melaksanakan agenda pembangunan nasional bahkan pem-bangunan di daerah.

Kebijakan pemerintah harus dibuat prorakyat supaya hal dalam kemajuan pembangunan infrastuktur seperti pendidikan dan kesehatan agar dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia.

Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah. Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri.

Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini. Berbagai pemerataan pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat.

Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat dan dampaknya, tumbuh biasbias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan.

Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan.

Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka, program, pelaksanaan program, dan pembiayaan yang dilakukan desa, baik itu kegiatan di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa.

Dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat perlu adanya pembangunan, karena pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan-perubahan yang di upayakan secara terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan. Konsep pembangunan terdapat makna alokasi sumber daya, pemberdayaan masyarakat dan regulasi. Adapun konsep pembangunan selanjutnya yang merupakan konsep yang sangat multidimensional dengan mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi dan sosial.

Pembangunan adalah proses-proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan yang sangat penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan

lembaga nasional serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta pemberantasan kemiskinan (Pasaribu, 2015).

Realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Pendem adalah Desa yang terletak di Kecamatan. Junrejo Kota Batu. Dalam pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan. partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 undang-undang no. 6 tahun 2014 dikatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah

kesenjangan antara perkotaan dan pe-desaan yang terlihat dari berbagai bidang, khususnya pada sektor ekonomi.

Salah satu kesenjangan disektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi disetiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejala dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah.

Paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikasi dari pembangunan yang bertumpuk pada Negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpuan pada masyarakat atau istilahnya pembangunan masyarakat. Namun pada prakteknya pemerintah sendiri mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari pembiayaan, juga terkadang penolakan terhadap pembangunan infrastruktur yang dirasakan kurang bermanfaat oleh masyarakat.

Oleh karena itu proses pembangunan infrastruktur Desa diperlukan proses partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Desa untuk mencapai perubahan yang baik dan perlu adanya terjalin komunikasi yang baik. Pembangunan infrastruktur adalah syarat-syarat yang perlu dalam pembangunan yang tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan. Hal yang perlu diketahui dalam lingkup Desa adalah pembanguna Desa yang memiliki cakupan yang sangat luas. Pembangunan pedesaan sangat perlu dilakukan agar tidak ada ketimpangan antara

pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan perkotaan dan Pedesaan (Theresia, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di Negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut. partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihak dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat dari pemerintah. Jika ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat meskipun pemerintah memberikan peluang maka partisipasi tidak akan terjadi. Jika ada kemauan serta kemampuan tetapi ruang dan kesempatan untuk warga masyarakat maka partisipasi juga tidak akan terjadi.

Namun jika kita melihat ke belakang bahwa mulai dari tahap awal partisipasi menggunakan pola berjenjang dari bawah keatas ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun sebelumnya ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pentingnya masyarakat dalam pembangunan desa ialah untuk mengingat masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai permasalahan seperti, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada sehingga memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Masalah yang dihadapi oleh Desa yaitu mengenai kurang partisipasinya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bangunan Desa karena kurang terkontrol disebabkan tidak adanya pengontrolan secara efektif, oleh karena itu partisipasi sangat berpengaruh terhadap infrastruktur pembangunan sebuah Desa

untuk mendorong para masyarakat agar mengikuti standar dan aturan. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui alokasi dana Desa (ADD) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan berbagai sektor yang ada ditingkat pedesaan. Namun demikian tanpa adanya pemanfaatan yang tepat baik dalam perencanaan, penetapan tujuan serta pengawasan, program sebaik apapun hanya akan menjadi bumerang, hanya berwujud teori tanpa aplikasi. 2. Penelitian ini sesuai dengan apa yang sedang penulis tekuni, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memberikan bukti nyata sekaligus sebagai fasilitator pengembangan ekonomi masyarakat dalam semua bidang.

Terkendalanya program pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat terjadi sebab kurangnya partisipasi warga dalam pembangunan Desa. Dimana warga kurang kebersamaan untuk bisa memecahkan dilema demi tercapainya pembangunan, rakyat kurang percaya diri atas kemampuannya buat memperbaiki mutu hidupnya serta warga terlalu cepat puas terhadap diri sendiri. sehingga perlunya strategi pemerintah desa untuk menaikkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa melakukan training pada masyarakat baik asal segi ekonomi, aturan, agama serta kesehatan, menyampaikan pelayanan kepada warga dan pengembangan terhadap rakyat pada bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat meliputi pikiran, tenaga dan barang/uang.sebab partisipasi warga sangat memilih berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur.

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat atau bahkan penolakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan.

Alasan mengambil judul diatas dilihat dari latar belakang masalah tercantum dalam permasalahan sejauh mana partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur Desanya Dari uraian diatas menyimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat mempermudah dalam membangun infrastruktur Desa maupun masyarakat Kota sehingga peneliti tertarik mengambil judul tentang **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Desa** (di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?
- b. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi pembangunan infrastruktur Desa Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan untuk tambahan ilmu dan pengetahuan serta refrensi untuk pihak lain dari partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Program Studi Administrasi Publik dapat lebih memperhatikan dan mempelajari partisipasi masyarakat dalam pemerataan pemerataan infrastruktur Desa
3. Dapat ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran yang sangat positif dari berbagai kalangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu berbagai bidang kebutuhan masyarakat
2. Dari hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pemerataan memberikan manfaat untuk dapat memecahkan berbagai masalah serta berbagai masukan positif yang bersifat membangun khususnya Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk meningkatkan terus pembangunan infrastruktur Desa.
3. Dan juga dapat mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.